

## **SKRIPSI**



# **TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENYEROBOTAN TANAH DI KABUPATEN TAKALAR**

(Studi Kasus Tahun 2014-2016)

**OLEH :**

**NURINDAH DAMAI LESTARI**

**B111 12 409**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

# **HALAMAN JUDUL**

## **TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENYEROBOTAN TANAH DI KABUPATEN TAKALAR (Studi Kasus Tahun 2014-2016)**

### **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka  
Penyelesaian Studi Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum  
Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**OLEH :**

**NURINDAH DAMAI LESTARI**

**B111 12 409**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENYEROBOTAN TANAH DI KABUPATEN TAKALAR**

(Studi Kasus Tahun 2014-2016)

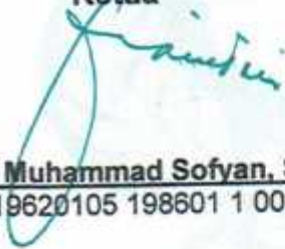
disusun dan diajukan oleh

**NURINDAH DAMAI LESTARI**  
**B 111 12 409**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, 12 September 2017  
Dan Dinyatakan Diterima

#### **Panitia Ujian**

**Ketua**



**Prof Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.**  
NIP. 19620105 198601 1 001

**Sekretaris**



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 19671010 199202 2 002

**An. Dekan**

**Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,**



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 19610607 198601 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

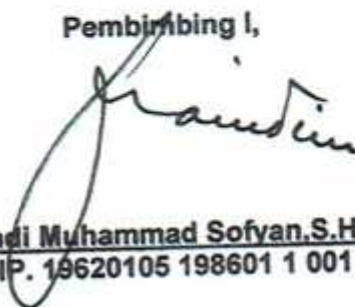
Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Nurindah Damai Lestari  
Nomor Induk : B111 12 409  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Proposal : Tinjauan Viktimologis terhadap Kejahatan  
penyerobotan tanah di Kabupaten Takalar  
(Studi kasus tahun 2014-2016)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, April 2017

Pembimbing I,



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.  
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 19671010 199202 2 002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NUR INDAH DAMAI L  
Nomor Pokok : B11112409  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2014-2016)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2017

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,

Prof. Dr. Ahmadi Maru,SH.,MH  
NIP. 19610607 198601 1 003

## ABSTRAK

**NURINDAH DAMAI LESTARI (B11112409), Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2014-2016)** di bawah bimbingan **Andi Muhammad Sofyan** sebagai Pembimbing I dan **Nur Azisa** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya Penyerobotan tanah dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dan pemerintah setempat dalam menaggulangi terjadinya penyerobotan tanah di Kabupeten Takalar..

Penelitian ini dilakukan di Kabupten Takalar, tepatnya di Polres Takalar, Kantor Kecamatan Galesong dan rumah-rumah korban penyerobotan tanah. bertujuan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kasus penyerobotan tanah di Kabupaten Takalar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dengan total jumlah 61 kasus dari tahun 2014 sampai 2016. Peranan korban dalam terjadinya kejahatan ini yaitu ketidaktahuan korban terkait kepemilikan tanahnya, tingginya harga tanah serta penjualan tanah yang menggunakan sistem kepercayaan. Adapun upaya yang dilakukan kepolisian dan pemerintah setempat untuk menanggulangi kejadian ini yakni dengan melakukan upaya preventif (pencegahan) berupa tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang dan terkait sebelum terjadinya suatu tindak penyerobotan tanah serta upaya represif (penindakan) berupa langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan.

## **ABSTRACT**

**NURINDAH DAMAI LESTARI (B111 12 409), The Victimology Review on Crime Against Soil Abuse in Takalar District (Case Study of 2014-2016) under the guidance of Andi Muhammad Sofyan as the Supervisor and Nur Azisa as the Co-Supervisor.**

This study aims to determine the role of victims in the occurrence of land grabs and efforts made by the police and local government in response to land grabs in Takalar.

This research was conducted in Takalar, precisely in Takalar Police, Galesong District Office and houses of victims of land grabbing. aims to obtain primary and secondary data. Data were obtained by using data collection technique through interview and documentation.

The results showed that the development of land grab cases in Takalar District increased from year to year, with a total of 61 cases from 2014 to 2016. The role of victims in the occurrence of this crime is the ignorance of victims related to land ownership, the high price of land and the sale of land using a trust system. The efforts made by the police and local government to overcome this incident is to make preventive efforts (prevention) in the form of precautions conducted by the authorities and related before the occurrence of acts of land grabbing and repressive efforts (action) in the steps taken by the relevant authorities after the commencement of an act of crime.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Viktimologis Terhadap Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2014-2016) ”**.

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tertinggi kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda **Nurdin Asmawi** dan Ibunda **Nurhaedah Yaring** yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, rasa kasih sayang, serta do'a yang tidak pernah putus. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kakak penulis **Nurhadi Reski Abadi, S.Si** yang selalu melindungi dan membantu penulis serta adik-adikku tersayang **Nurazizah, Al-Qaaf**, dan **Fahri** yang selalu menghibur dengan canda yang menjadi penyemangat penulis selama ini.

Penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna yang masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran penulis sangat harapkan. Selesaiannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan para pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwi Aries Tina Pulubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



3. Bapak **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan I, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan II, dan Bapak **Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan Ibu **Dr. Nurazisa, S.H., M.H** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak **Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.**, Bapak **Prof. Dr. Muhadar, SH., MS.** dan Ibu **Dr. Haeranah, S.H., M.H** selaku dosen penguji.
6. Seluruh Dosen pengajar yang telah banyak berjasa mendidik penulis dan para Staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tak kenal lelah membantu.
7. Kepala Polres Takalar beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan izin untuk meneliti serta memberikan informasi dan data pendukung untuk skripsi ini.
8. Camat Galesong beserta Pengawai Kantor Kecamatan Galesong.
9. Ketua Pengadilan Negeri Takalar beserta hakim, panitera, dan pegawai Pengadilan Negeri Takalar
10. Bapak Desa Tobatang beserta jajarannya dan seluruh masyarakat Desa Tobatang yang telah menerima dan membantu penulis selama melaksanakan KKN. Serta Bapak **Tajang** dan Ibu **Lina** yang telah

menerima penulis dirumahnya dan menjadi orangtua penulis selama melaksanakan KKN.

11. Sahabat-sahabatku **Putri, Ririn,** serta **Irma** yang selalu menyemangati, menasehati dan menghibur penulis.
12. Sahabat- sahabatku Ghibahits yang selama ini menemani dalam suka tanpa duka, senantiasa membantu dan memotivasi penulis selama kuliah **Rani Kancil, Mak Dije, jeng Arif dan jeng Rudi, Gio, Indah Sari,** serta **Melisa** dan **Kune.**
13. Saudara-saudaraku Squad 24: **Dandi, Aul, Yandju, Yunus, Nuga, Ekky, Amri, Yayat, Dayat, Nisa, Ibon, Liyana, Yayan, Ardi, Aksa, Rasda, Lili,** dan **Agung.** Sekali Melangkah Pantang Menyerah..
14. Keluarga Besar Perbakin Unhas yang memberikan banyak pelajaran, pengalaman dan motivasi dan bagaikan rumah kedua bagi penulis.
15. Kakak dan adik-adikku Keluarga besar LP2KI Fakultas Hukum Unhas yang senantiasa menyemangati dan berbagi pengalaman dengan penulis.
16. Teman-teman seperjuangan di PETITUM 2012: **Untad, Cindra, Ridwan, Fitrah, Riska, Putra, Anas, Fikar, Zul, Tiwi, Dilla** dan teman kos ku **Unhis** serta teman-teman yang lain yang tak dapat disebutkan satu persatu
17. Teman-teman KKN Gelombang 93 Desa Tobatang, Wajo. **Afat, Riska, Zhaza, Suci, Ochang** dan **Ucu** yang telah membantu dan berbagi pengalaman selama di kampung orang.

18. Serta semua pihak yang tidak disebutkan namanya satu demi satu, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat betapapun kecilnya baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan praktisi.

Makassar, 12 September 2017

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Viktimologi.....	8
1. Pengertian Viktimologi .....	8
2. Ruang Lingkup Viktimologi.....	10
3. Manfaat Viktimologi.....	13
B. Korban Kejahatan.....	14
1. Pengertian Korban .....	14
2. Tipologi Korban .....	16
3. Peran Korban Dalam Terjadinya Kejahatan .....	18
C. Kejahatan .....	21
1. Pengertian Kajahatan.....	21
2. Teori-teori Penyebab Kejahatan.....	24
D. Penyerobotan Tanah .....	29

1. Pengertian.....	29
2. Peraturan yang Terkait dengan Penyerobotan Tanah .....	32
E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Lokasi Penelitian .....	42
B. Jenis dan Sumber Data .....	42
C. Teknik Pengumpulan Data .....	42
D. Metode Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Peranan Korban Terhadap Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Takalar .....	44
1. Perkembangan Penyerobotan Tanah pada tahun 2014-2016 di Kabupaten Takalar .....	44
2. Peranan Korban Dalam Penyerobotan Tanah di Kabupaten Takalar .....	48
B. Upaya yang Dilakukan Kepolisian dan Pemerintah Setempat dalam Menanggulangi Adanya Korban Penyerobotan Tanah.....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Tindak Penyerobotan Tanah Yang Dilaporkan Di Wilayah Hukum Polres Takalar Tahun 2014-2016.....	45
Tabel 2. Jumlah Kejahatan Penyerobotan Tanah Di Kantor Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun 2010-2014 .....	46
Tabel 3. Jumlah Kejahatan Penyerobotan Tanah Yang Diadili Di Pengadilan Negeri Takalar Tahun 2010-2014 .....	47

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sejarah peradaban manusia, tanah merupakan faktor utama yang dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah merupakan sarana dan kebutuhan yang sangat penting bagi kebutuhan manusia. Sejalan dengan perkembangan jaman dan pembangunan, kebutuhan akan penggunaan tanah tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah.

Ketergantungan manusia yang demikian besar pada tanah, baik untuk kebutuhan tempat pemukiman maupun sebagai sumber mata pencaharian, sedangkan persediaan tanah sangat terbatas baik jumlah maupun luasnya tetap dan tidak bertambah dalam segala dimensi kebutuhan manusia. Ketidak seimbangan antara jumlah dan luasan tanah yang tersedia dan kebutuhan penggunaan yang semakin meningkat menyebabkan tanah mempunyai arti yang sangat penting, sehingga campur tangan negara melalui aparatnya dalam tatanan hukum pertanahan merupakan hal yang mutlak.

Kebutuhan tanah yang demikian memegang peranan penting baik dalam kehidupan manusia maupun dalam dinamika pembangunan dengan sendirinya disamping membawa dampak positif meningkatnya harga tanah juga membawa dampak negatif yaitu timbulnya konflik

pertanahan dengan berbagai macam modus operandi.<sup>1</sup> Konflik pertanahan menurut Hamzah yang dikutip oleh Hambali Thalib, diistilahkan dengan delik dibidang pertanahan, yang pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yang meliputi :

- a. Konflik pertanahan yang diatur dalam kodifikasi hukum pidana, yaitu konflik (delik) yang diatur dalam beberapa pasal yang tersebar dalam kodifikasi hukum pidana;
- b. Konflik pertanahan yang diatur diluar kodifikasi hukum pidana, yakni konflik (delik) pertanahan yang khusus terkait dengan peraturan perundang-undangan pertanahan diluar kodifikasi hukum pidana.<sup>2</sup>

Salah satu konflik pertanahan yang sering terjadi adalah pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, atau biasa disebut penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.<sup>3</sup> Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah yang

---

<sup>1</sup> Hambali Thalib, 2005, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm 3.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 27.

<sup>3</sup> Ivor Ignasio Pasaribu, 2013, *Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana* <http://www.hukumproperti.com/pertanahan/penyerobotan-tanah-secara-tidak-sah-dalam-perspektif-pidana/>, diakses pada September 2016.



sering terjadi seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. Didalam Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang. Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 peraturan tersebut adalah

- a. barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1;
- b. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- c. barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini;
- d. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini.

Penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), didalam proses penyelidikan maupun penyidikan selalu menggunakan Pasal 167 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sehingga pasal tersebut dikategorikan sebagai pasal yang mengatur terkait penyerobotan tanah dan apabila penyerobotan tanah tersebut dilakukan dengan maksud untuk menjual atau menukarkan kepada pihak lain maka dapat diancam dengan Pasal 385 KUHP terkait penggelapan tanah dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual menukarkan atau membebani dengan *credietverband* suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

Salah satu contoh kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh Umar dg. Sarro dan Bakri dg. Naba yaitu dengan menanam tanah dengan tanaman padi tanpa izin dari yang berhak dimana kasusnya telah diadili di Pengadilan Negeri Takalar dengan nomor putusan 07/Pid.c/2016/PN.Tka. Kemudian kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Kecamatan Polombangkeng Utara yang dilakukan oleh Jamaluddin C dg.Kulle yang mengakui sebuah tanah kemudian membajak dan menanaminya padi,

kasusnya juga telah diadili di Pengadilan Negeri Takalar dengan nomor putusan 10/Pid.c/2016.PN.Tka.

Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, cara pandang kita sebaiknya tidak hanya terfokus pada pada berbagai hal yang berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode yang efektif untuk penanggulangannya. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah masalah korban kejahatan yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan.<sup>5</sup> Hal ini pun berlaku pada tindak penyerobotan tanah dimana korban dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya tindak penyerobotan tanah tersebut.

Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban seringkali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Tanpa adanya korban tidak mungkin adanya kejahatan. Dalam hal ini peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak-pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam kejahatan tertentu pihak korban dapat dikatakan bertanggungjawab.<sup>6</sup>

Pada umumnya penyerobotan tanah terjadi karena ketidak pedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya. Pada beberapa kasus

---

<sup>5</sup> Didik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 33.

<sup>6</sup> Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 82.

terjadinya dikarenakan pemilik tanah memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengelolah tanahnya yang dikemudian membuatkan akta tanah baru tanpa sepengetahuan pemilik tanah dengan maksud yang buruk. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung pemilik tanah sebagai korban memiliki peranan yang mempengaruhi terjadinya tindak penyerobotan tanah.

Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul, **Tinjauan Viktimologis Terhadap Penyerobotan Tanah di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2014-2016).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan korban terhadap dalam terjadinya kejahatan penyerobotan tanah di Kabupaten Takalar?

2. Upaya apakah yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah setempat dalam menanggulangi adanya korban kejahatan penyerobotan tanah di Kabupaten Takalar?

### **C. Tujuan**

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan pokok permasalahan di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui peranan korban terhadap terjadinya kejahatan penyerobotan tanah di Kabupaten Takalar
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah setempat dalam menanggulangi adanya korban kejahatan penyerobotan tanah di Kabupaten Takalar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta dapat menambah bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut
2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengembangkan tugas profesi hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Viktimologi**

##### **1. Pengertian Viktimologi**

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.<sup>7</sup>

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara Terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>8</sup> Selain itu viktimologi juga merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.<sup>9</sup>

Menurut J.E.Sahetapy, viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 33.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 34.

<sup>9</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 43.

menurut Menurut Arief Gosita, Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.<sup>10</sup>

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu :

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur social tertentu suatu masyarakat tertentu.<sup>11</sup>

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungan, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lain.

---

<sup>10</sup> J.E. Sahetapy, 1995, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, hlm. 158.

<sup>11</sup> Arif Gosita, *op.cit.*, hlm 40.

Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.<sup>12</sup>

## **2. Ruang Lingkup Viktimologi**

Viktimologi yang pada hakikatnya merupakan pelengkap atau penyempurnaan dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berusaha menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau penimbunan korban kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional dan bertujuan memberikan dasar pemikiran guna mengurangi dan mencegah penderitaan dan kepedihan didunia ini. Antara lain yang ingin dicegah adalah pelaksanaan politik kriminal yang dapat menimbulkan berbagai kejahatan atau viktimisasi (penimbunan korban) lain lebih lanjut antara yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan demi suatu keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan. Jadi, jelas

---

<sup>12</sup> Rena Yulia, *op.cit.*, hlm 44-45.



viktimologi yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat merupakan sarana untuk memperjuangkan hak dan kewajiban manusia.

Menurut J.E Sahepaty ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan<sup>13</sup>, termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Namun dalam perkembangannya di tahun 1985 Separovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam karena korban bencana alam diluar kemauan manusia (*out of man's will*). Pada tahap perkembangan ini pula, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara.

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi:

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang

---

<sup>13</sup> J.E. Sahepaty, *op.cit.*, hlm. 158

- tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
- d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;<sup>14</sup>

Didik M. Arief dan Elisatri Gultom<sup>15</sup> menyatakan viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, menurut Muladi, viktimologi merupakan studi yang bertujuan untuk :

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi
- c. Mengembangkan system tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.<sup>16</sup>

Objek studi atau ruang lingkup perhatian viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal

---

<sup>14</sup>Muhadar, 2013, *Korban Pembebasan Tanah Prespektif Viktimologis*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm 22.

<sup>15</sup> Didik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *op.cit.*, hlm 43

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 43

- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal: argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- e. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.<sup>17</sup>

### 3. Manfaat Viktimologi

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu :

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.<sup>18</sup>

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai dasar sebab musabab terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan dalam usaha mengerti akan permasalahan kejahatan. Viktimologi juga berperan dalam penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

Arif Gosita menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>17</sup>Arif Gosita, *op.cit.*, hlm. 329.

<sup>18</sup> Didik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *op.cit.*, hlm 65

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal diberbagai kehidupan dan penghidupan.
- b. Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
- c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka.
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat siosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintah untuk keuntungan sendiri.
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.<sup>19</sup>

## **B. Korban Kejahatan**

### **1. Pengertian Korban**

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan

---

<sup>19</sup> Arif Gosita, *op.cit.*, hlm 32.

yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta merta yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>20</sup>

Menurut Mendelsohn<sup>21</sup>, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah dari pelaku;
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Korban menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Kemudian berdasarkan deklarasi PBB dalam *The Declaration Of Basic Principles Of Justice For Viktims Of Crime And Abuse Of Power* 1985 pada angka 1 disebutkan bahwa korban adalah :

*Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power.*

Arif Gosita juga memberikan pengertian tentang korban, bahwa yang dimaksud dengan koban adalah mereka yang menderita jasmaniah

---

<sup>20</sup> Didik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *op.cit.*, hlm 34

<sup>21</sup> *op.cit.*, hlm. 52.

dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>22</sup>

Muliadi menyatakan bahwa Korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>23</sup>

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi dirinya/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.<sup>24</sup>

## **2. Tipologi Korban**

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan muncullah beberapa jenis korban yaitu :

---

<sup>22</sup> Arif Gosita, *op.cit.*, hlm 41.

<sup>23</sup> Didik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *op.cit.*, hlm 47.

<sup>24</sup> Didik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *op.cit.*, hlm 43

- a. *Nonparticipating victim* adalah mereka yang menolak/menyangkal kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.<sup>25</sup>

Apabila Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu:

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggungjawab sepenuhnya berada dipihak korban.
- b. *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang lain untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat yang bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 49.

pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada pelaku atau masyarakat.

- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik<sup>26</sup>

Menurut Sellin dan wolfgang<sup>27</sup> pengelompokan korban yaitu sebagai berikut:

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok)
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produk

### **3. Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana**

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan korban.<sup>28</sup>

Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan orang lain menjadi korban, sebagaimana yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa hubungan

---

<sup>26</sup>Lilik Mulyadi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Denpasar: Djambatan, hlm.123.

<sup>27</sup> Didik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *op.cit.*, hlm 49

<sup>28</sup> Rena Yulia, *op.cit.*, hlm 75.



antara korban dengan pelaku adalah hubungan sebab akibat. Akibat perbuatan pelaku, yaitu suatu kejahatan dan korban yang menjadi objek sasaran pelaku menyebabkan korban harus menderita karena kejahatan.

Secara sosiologis dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat, semua warga negara berpartisipasi penuh atas terjadinya kejahatan, sebab masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional.

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai sehingga muncul atau terjadi tindak pidana.<sup>29</sup> Lebih lanjut tentang masalah ini Rena Yulia beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan suatu tindak pidana atau kejahatan adalah:

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. Keuntungan akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;

---

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, hlm 18.

- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggungjawab atau tidak, secara aktif atau pasif.<sup>30</sup> Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung.

Mendelson mengemukakan, keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi enam kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu :<sup>31</sup>

1. Korban sama sekali tidak bersalah
2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri
3. Korban sama salahnya dengan pelaku
4. Korban lebih bersalah daripada pelakunya
5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah
6. Korban pura-pura dan korban imajinasi

Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan korban.

---

<sup>30</sup> Arif gosita, *op.cit.*, hlm 82

<sup>31</sup> Rena Yulia, *op.cit.*, hlm 80.

4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.<sup>32</sup>

Tanpa adanya korban tidak mungkin adanya kejahatan. Dalam hal ini peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak-pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional.<sup>33</sup> Bahkan dalam kejahatan tertentu pihak korban dapat dikatakan bertanggungjawab.

## **C. Kejahatan**

### **1. Pengertian Kejahatan**

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat disesalkan oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat. Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau mendengar.

Pada awalnya, kejahatan hanyalah merupakan “cap” yang diberikan masyarakat pada perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Tetapi jika dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perumusan kejahatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 81.

<sup>33</sup> Arif Gosita, *op.ci.t*, hlm 82.

adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sejumlah pakar hukum pidana mendefinisikan kejahatan berdasarkan pemikiran mereka masing-masing, salah satunya adalah R. Soesilo. Definisi kejahatan menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*" (1985, Penerbit Politeia) membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis, menurut R. Soesilo, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>34</sup>

Menurut A. S. Alam<sup>35</sup> definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu :

- a. Kejahatan dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.
- b. Kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah : setiap perbuatan yang melanggar norma-

---

<sup>34</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1985).

<sup>35</sup> A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm.16

norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat islam dan namun dari sudut pandang hukum bukanlah kejahatan.

Adapun pendapat dari para ahli mengenai pengertian kejahatan, sebagai berikut :

1. Menurut J.E Sahetapy<sup>36</sup>

Perkataan kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang tercela oleh masyarakat. Misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, pemalsuan surat-surat, penyerobotan oleh manusia.

2. Menurut Arif Gosita<sup>37</sup>

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, dan karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mepengaruhi. Dimana kejahatan tidak hanya dirumuskan oleh Undang-Undang Hukum Pidana tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat, tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu.

Dapat dikatakan, perilaku kejahatan adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada atau hasil kondisi lingkungan tertentu. Dengan demikian, kita sampai pada perhatian adaptasi pada suatu lingkungan sebagai suatu proses yang menentukan.

Menurut Black bahwa *crime is a social harm that the law makes punishable; the breach of a legal duty treated as the subjectmatter of a criminal proceeding,*” sedangkan Huge D. Barlow, sebagaimana yang

---

<sup>36</sup> J.E Sahetapy, *op.cit*, hlm.23

<sup>37</sup> Arif Gosita, *op.cit*, hlm.117

dikutip oleh Topo Santoso dan Eva A. Zulfa, menyebutkan bahwa kejahatan adalah *a human act that violates the criminal law*.<sup>38</sup>

Menurut Van Bemmelen<sup>39</sup> kejahatan adalah tiap melakukan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Sekalipun perumusan kajahatan sangat beragam namun pada intinya memiliki kesamaan unsur, dengan mengacau pada pendapat Kimball<sup>40</sup>, unsur-unsur (elemen) kejahatan itu adalah :

- a. *An actor*
- b. *With a guilty mind (mens rea)*
- c. *Who cause*
- d. *Harm*
- e. *In particular way or setting, and*
- f. *A lawmaker who has decreed that these circumstances expose the actor to imposition of fine, imprisonment, or death as a penalty.*

## **2. Teori-teori Penyebab Kejahatan**

Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah dilanjutkan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada suatu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

---

<sup>38</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 13.

<sup>39</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *op.cit*, hlm.56

<sup>40</sup> Ibid, hlm.56

Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum. Atau perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>41</sup>

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab membawa resiko yang lebih besar.

Adapun teori-teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis, dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu<sup>42</sup>

- a. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan)
- b. *Cultural deviance* (penyimpangan budaya)
- c. *Social control* (control social)

Teori *anomie* dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan social (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yaitu adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi.

---

<sup>41</sup> Rena Yulia, *op.cit.*, hlm 86-87.

<sup>42</sup> A. S. Alam, *op.cit.*, hlm. 45

Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*illegitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha maju, dan lain-lain.

## 1. Teori-teori *anomie*

### a. Emile Durkheim

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi.

Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah *anomie* sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai.

*Anomie* dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis (memenangkan diri sendiri/egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti dengan menyimpang dalam pergaulan masyarakat.

### b. Robert Merton

Konsepsi Merton tentang *anomie* agak berbeda dengan konsepsi Durkheim. Masalah sesungguhnya, menurut Merton, tidak diciptakan oleh



*sudden social structure* (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Menekankan pentingnya dua unsur di setiap masyarakat, yaitu :

- 1) *Cultural aspiration* atau *cultural goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan.
- 2) *Institutionalized means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu.

Dalam masyarakat menurut pandangan Merton telah melembaga suatu cita-cita (*goals*) untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang.

## 2. Teori-teori penyimpangan budaya (*cultural deviance theories*)

Teori penyimpangan budaya memfokuskan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. *Cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, adalah :

- a. *Social disorganization*
- b. *Differential association*
- c. *Cultural conflict*

*Social disorganization theory* memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

*Differential association theory* yang dicetus oleh Sutherland bermakna bahwa pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi penjahat dan bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena dorongan posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya.

*Cultural conflict theory*, menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-ciri yaitu kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup, sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan. Sellin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan (*clash*). Konflik sekunder terjadi jika suatu budaya berkembang menjadi budaya yang beerbeda-beda.

### 3. Teori kontrol sosial (*control social theory*)

Pengertian teori kontrol sosial merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu,

pengertian kontrol sosial merujuk pada pembahsan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Travis Hirschi telah memberika suatu gambaran yang jelas mengenai konsep *social bonds* (ikatan sosial). Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya dan menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterkaitan moral dengan orang tua, sekolah, dan lembaga lainnya. Hirschi kemudian menjelaskan bahwa *social bonds* meliputi empat unsur yaitu :

- a. *Attachment* (keterikatan) adalah keterikatan seseorang pada orang tua, sekolah, atau lembaga lainnya yang dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan melakukan kejahatan.
- b. *Involvement* (keterlibatan) bahwa frekuensi kegiatan positif (belajar tekun, anggota pramuka, panjat tebing) dan lain-lain. Cenderung menyebabkan seseorang itu tidak terlibat dalam kejahatan.
- c. *Commitment* (pendirian kuat yang positif) bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang wiraswasta tetap dijaga untuk mewujudkan cita-citanya.
- d. *Belief* (pandangan nilai moral yang tinggi) merupakan unsur nilai yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur ini menyebabkan seseorang merasakan adanya kewajiban moral untuk menaatinya.

## **D. Penyerobotan Tanah**

### **1. Pengertian**

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang

lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.<sup>43</sup>

Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.<sup>44</sup> Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah yang sering terjadi seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain.

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain (*trespass to land*) adalah suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak atau benda lain untuk masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain. Unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain adalah adanya tindakan oleh pelaku, adanya maksud (keinginan), masuk atau berada di tanah milik orang lain,

---

<sup>43</sup> Ivor Ignasio Pasaribu, *op.cit.*.

<sup>44</sup> *Ibid.*

pihak korban adalah pihak yang berwenang menguasai tanah tersebut, adanya hubungan sebab akibat, dan tidak dengan persetujuan korban.<sup>45</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. Didalam Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang. Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 peraturan tersebut adalah

- a. Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1;
- b. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- c. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini;
- e. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini.

Penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), didalam proses penyelidikan maupun penyidikan selalu menggunakan Pasal 167 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

---

<sup>45</sup> Munir Fuady, 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 55.

Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sehingga pasal tersebut dikategorikan sebagai pasal yang mengatur terkait penyerobotan tanah dan apabila penyerobotan tanah tersebut dilakukan dengan maksud untuk menjual atau menukarkan kepada pihak lain maka dapat diancam dengan Pasal 385 KUHP terkait penggelapan tanah dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual menukarkan atau membebani dengan *credietverband* suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

## **2. Peraturan Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah**

### **a) Pasal 167 KUHP:**

- (1) Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- (2) Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau barang siapa tidak setuju yang berhak lebih

- dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk;
- (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang pidana menjadi paling lama satu tahun empat bulan;
  - (4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 167 KUHP diatas orang dapat mengetahui bahwa yang diatur didalamnya sebenarnya hanya satu tindak pidana, yakni yang disebut tindak pidana *uisvredebreuk* atau gangguan terhadap kebebasan bertempat tinggal.<sup>46</sup>

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP hanya terdiri atas unsur-unsur objektif, masing-masing sebagai berikut: <sup>47</sup>

- a. *Wederrechtelijk* atau melawan hukum;
- b. *Binnendringen* atau memasuki dengan paksa;
- c. *In de woning of besloten lokaal of ert, bij een ander in gebruik* atau ke dalam sebuah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain;
- d. *Zich aldaar vertoeven* atau berada di sana;
- e. *Niet aanstonds verwijderen op wondering van of vanwege den rechthebbende* atau tidak segera pergi setelah ada permintaan dari atau atas nama orang yang berhak.

Seorang pelaku hanya dapat terbukti telah mempunyai kesengajaan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, jika di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku dapat dibuktikan bahwa:<sup>48</sup>

- a. Pelaku telah menghendaki secara melawan hukum memasuki dengan paksa;

---

<sup>46</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik- Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 577.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 577.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 579-580.

- b. Pelaku memang mengetahui bahwa yang ia masuki dengan paksa itu ialah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman tertutup yang dipakai oleh orang lain;
- c. Pelaku telah menghendaki tetap berada disana;
- d. Pelaku telah menghendaki tidak segera pergi setelah ada permintaan dari atau nama orang yang berhak atas tempat tinggal, ruangan atau halaman tertutup tersebut.

Yang dipandang pula sebagai masuk dengan paksa ialah menurut ayat dua :<sup>49</sup>

- a. Mereka yang masuk dengan memecah, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dinas palsu atau
- b. Mereka yang tidak setahu yang berhak dan lain dari pada karena keliru, masuk ketempat tersebut dan kedatangan pada waktu malam.

Unsur objektif ketiga dari tindak pidana ini ialah *in de woning of bestolen lokaal of erf, bij een ander ingebruik* atau dalam sebuah tempat tinggal atau suatu ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain. Yang dimaksud dengan *woning* atau tempat tinggal adalah setiap tempat tinggal yang diperuntukkan dan disusun sebagai tempat tinggal, sehingga termasuk juga dalam pengertiannya, yakni sebagai tempat tinggal dan kapal-kapal yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal.<sup>50</sup> Menurut Simons yang dimaksud dengan suatu *besloten lokaal* atau suatu ruangan yang tertutup itu ialah suatu ruangan yang tidak sepenuhnya bebas untuk dimasuki, hingga kedatangan orang ke dalam ruangan seperti itu dapat ditolak. Sedangkan yang dimaksud dengan

---

<sup>49</sup> R. Susilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Poletia Bogor, hlm 144

<sup>50</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *op.cit.*, hlm 580.



*bestoten erf* atau halaman tertutup ialah halaman yang dibuat terpisah dari tanah sekelilingnya dengan memberikan suatu pembatas, yang dapat dilihat.<sup>51</sup>

b) Pasal 385 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun :

- 1) barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain
- 2) barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani crediet verband, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain ;
- 3) barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan crediet verband mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan.
- 4) barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.
- 5) barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan
- 6) barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Kejahatan tersebut didalam pasal ini biasa disebut kejahatan *stellionnat* yang berarti penggelapan ha katas barang-barang yang tidak bergerak (*onroerende goederen*) barang-barang yang tidak bergerak

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 581.

misalnya tanah, sawah gedung dan lain-lain. Supaya dapat dikenakan pasal ini, maka terdakwa harus telah nyata berbuat hal-hal sebagai berikut :<sup>52</sup>

- a. Terdakwa ada maksud untuk menguntungkandiri sendiri atau orang lain dengan malawan hak (secara tidak sah)
- b. Terdakwa telah menjual; menukar atau berarti dengan creditverband hak pakai bumi putera atas tanah milik Negara atau tanah milik partikulir atau gedung, pekerjaan, tanaman atau taburan diatas tanah hak pakai pribumi
- c. Terdakwa mengetahui bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain
- d. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa tanah disitu ada credit verbandnya
- e. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa tanah itu sudah digadaikan
- f. Terdakwa telah menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain
- g. Terdakwa telah menjual atau menukarkan tanah yang sedang digadaikan pada orang lain dengan tidak memberitahukan tentang hal itu kepada pihak yang berkepentingan
- h. Terdakwa telah menyewakan tanah buat selam suatu massa, sedang diketahuinya, bahwa tanah itu sebelumnya telah disewakan kepada orang lain.

c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Peraturan ini menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6).

Kedua pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>52</sup> R. Susilo, *op.cit.*, hlm 266.

Pasal 2 yang berbunyi : “Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”.

Pasal 6 yang berbunyi :

1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan Pasal 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - a. barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1;
  - b. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
  - c. barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini;
  - d. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini;
2. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
3. Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Apabila menyimak ketentuan Pasal 6 tersebut diatas, maka dapat dikemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya mengandung empat rumusan delik yang unsur-unsurnya sebagai berikut

.53

---

<sup>53</sup> | Wayan Suandra, 1994. *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta hlm 55-56.

a. Perumusan delik Pasal 6 ayat (1) a :

- Barangsiapa;
- Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah (kecuali pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan yang menurut Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 jo Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956, yang selanjutnya akan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh menteri agraria);
- Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

b. Perumusan delik Pasal 6 ayat (1) b :

- Barangsiapa;
- Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

c. Perumusan delik Pasal 6 ayat (1) c :

- Barangsiapa;
- Menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan;
- Dengan lisan atau tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak/kuasanya yang sah, atau mengganggu yang

berhak/kuasanya yang sah dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

- Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Perumusan delik Pasal 6 ayat (1) d :

- Barangsiapa;
- Memberikan bantuan dengan cara apapun juga memakai tanah tanpa izin atau mengganggu yang berhak(kuasanya yang berhak) dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

#### **D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Kejahatan merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia sejak dahulu. Menyadari tingginya tingkat kejahatan yang terjadi dari tahun ketahun, maka secara langsung ataupun tidak langsung mendorong perkembangan reaksi terhadap kejahatan dan perilaku kejahatan berupa upaya penanggulangan terhadap kejahatan tersebut.

Menurut A. S. Alam Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :<sup>54</sup>

1. Pre-Emtif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penganggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai/norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegak hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Menurut Hoefnagels<sup>55</sup> upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara :

a) *Criminal application* : (penerapan hukum pidana)

Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.

b) *Preventif without punishment* : (pencegahan tanpa pidana)

Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan *prevensi*

---

<sup>54</sup> A.S. Alam, *op.cit*, hlm. 79.

<sup>55</sup> Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 2.

(pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat.

- c) *Influencing views of society on crime and punishment* (mas media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mas media).

Contohnya : mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Takalar, tepatnya di rumah-rumah korban penyerobotan tanah, Kantor Kepolisian Takalar, Kantor Kecamatan Galesong, dan Pengadilan Negeri Takalar. Dipilihnya lokasi di Kabupaten Takalar dengan pertimbangan bahwa pada daerah tersebut sering terjadi kejahatan di bidang pertanahan dalam hal ini mengenai kejahatan penyerobotan tanah.

#### **B. Jenis Dan Sumber Data**

Data yang dikembangkan dalam penulisan ini, diperoleh dari dua sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan korban penyerobotan tanah, aparat dari Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Takalar dan Pemerintah Kabupaten Takalar.
2. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal dan buku-buku, peraturan perundang-undangan terkait dengan kejahatan di bidang Pertanahan.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penyusunan proposal ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan terbagi atas dua antara lain:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)



Didalam melakukan penelitian lapangan (*Field research*) penulis melakukan wawancara langsung kepada narasumber terkait yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada korban penyerobotan tanah dan aparat penegak hukum.

## 2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dari literatur yang ada dan relevan dengan masalah yang dibahas.

### **D. Metode Analisis Data**

Data-data yang telah di peroleh, baik berupa data primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Hasilnya akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas, logis, dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peranan Korban Terhadap Penyerobotan Tanah Di Kabupaten**

##### **Takalar**

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku

Penyerobotan tanah pada umumnya terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan ketidakpeduliannya terhadap asset tanah miliknya. Pada beberapa kasus terjadinya dikarenakan pemilik tanah memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengelolah tanahnya yang kemudian diklaim oleh orang tersebut sebagai tanah miliknya. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung pemilik tanah sebagai korban memiliki peranan yang mempengaruhi terjadinya tindak penyerobotan tanah.

Untuk mencari tahu mengenai peranan korban dalam terjadinya penyerobotan tanah selama tiga tahun terakhir antara tahun 2014 sampai tahun 2016 di Kabupaten Takalar, dan untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dan kepolisian dalam mengurangi terjadinya penyerobotan tanah di Kabupaten Takalar, maka penulis melakukan penelitian di Polres Takalar, Kantor Kecamatan Galesong dan

Pengadilan Negeri Takalar dan melakukan wawancara terhadap beberapa korban yang mengalami penyerobotan tanah di Kabupaten Takalar.

1. Perkembangan Penyerobotan Tanah pada tahun 2014-2016 di Kabupaten Takalar

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah penulis peroleh dari Kepolisian Resort (Polres) Takalar mulai tahun 2014 sampai tahun 2016, maka menunjukkan beberapa hasil yang didasarkan pada laporan dan pengaduan yang diterima oleh Polres Takalar. Untuk menggambarkan jumlah penyerobotan tanah tersebut, penulis rangkum dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
**Jumlah Tindak Penyerobotan Tanah yang dilaporkan di Wilayah Hukum Polres Takalar Tahun 2014-2016:**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	2014	9	14,75%
2	2015	13	21,31%
3	2016	39	63,93%
	<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>100%</b>

Sumber: Polres Takalar, 2017

Secara umum dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penyerobotan tanah yang dilaporkan di Polres Takalar mengalami peningkatan pada tahun 2014 dibandingkan pada tahun 2015. Pada tahun 2014 tercatat 9 (14,75%) kasus, sedangkan pada tahun 2015 tercatat 13 (21,31%) kasus.

Setelah itu, pada tahun 2016 kasus yang dilaporkan mengalami peningkatan cukup drastis, dari 13 kasus menjadi 39 (63,93%) kasus.

Jumlah kasus penyerobotan tanah pada tahun 2014 merupakan jumlah paling sedikit yang dilaporkan di Polres Takalar. Sedangkan yang paling banyak dilaporkan adalah pada tahun 2016. Melihat hasil dari jumlah kasus penyerobotan tanah selama 3 tahun pada tabel di atas, maka secara keseluruhan tercatat berjumlah 61 kasus dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tingkat kecamatan sendiri penulis melakukan penelitian di Kecamatan Galesong dimana terdapat beberapa kasus penyerobotan tanah yang tercatat mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2016 yang dilaporkan ke Kantor Kecamatan Galesong. Berikut merupakan data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Galesong :

**Tabel 2**

**Jumlah Tindak Penyerobotan Tanah Di Kantor Kecamatan Galesong  
Kabupaten Takalar  
Tahun 2014-2016:**

No	Tahun	Penanganan		
		Mediasi	Pengadilan	Proses Penanganan
1	2014	0	0	0
2	2015	2 kasus	0	0
3	2016	3 kasus	7 kasus	5 kasus
	<b>Jumlah</b>	<b>5 kasus</b>	<b>7 kasus</b>	<b>5 kasus</b>

Sumber: Kantor Kecamatan Galesong, 2017

Berdasarkan tabel diatas jumlah kasus penyerobotan tanah di Kecamatan Galesong dari tahun 2014-2016 berjumlah 17 kasus, yakni diantaranya yang diselesaikan melalui jalur mediasi berjumlah 5 kasus dan pada jalur pengadilan berjumlah 7 kasus. Sedangkan kasus pada tahap proses penanganan berjumlah 5 kasus.

Pada tingkat pengadilan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Takalar dan menemukan beberapa kasus penyerobotan tanah yang telah diadili oleh Pengadilan Negeri Takalar. Berikut merupakan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Takalar :

**Tabel 3**

**Jumlah Tindak Penyerobotan Tanah yang diadili di Pengadilan Negeri Takalar Tahun 2015-2016:**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2	2015	1
3	2016	3
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>

Sumber: Pengadilan Negeri Takalar, 2017

Berdasarkan tabel diatas kita dapat melihat perkembangan jumlah kasus penyerobotan tanah yang diadili oleh Pengadilan Negeri Takalar mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Takalar memutus 1 kasus dan pada tahun 2016 memutus 3 kasus.

Dari tabel-tabel tersebut diatas menunjukkan perkembangan kasus penyerobotan tanah yang terus meningkat dari tahun ketahun. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat. Penyerobotan

tanah tersebut dapat berkurang apabila adanya keterlibatan dan kerja sama dari banyak pihak, dalam hal ini kepolisian dan pemerintah setempat menjalankan tugas dan fungsinya melindungi dan membantu masyarakat terutama untuk menciptakan rasa aman.

## 2. Peranan Korban Dalam Penyerobotan Tanah Di Kabupaten Takalar.

Faktor-faktor terjadinya suatu kejahatan tentunya tak luput dari peranan korban itu sendiri. Wujud peranan korban itu dapat berupa tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja mengundang para pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Tindakan mengundang ini dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku situasi dan kondisi pihak korbanlah yang mengurangi timbulnya suatu kejahatan.

Menurut A. Nuraeni Nurdin selaku staf bidang pemerintahan Kecamatan Galesong yang berdasarkan wawancara (6 Maret 2017) menjelaskan faktor terjadinya penyerobotan tanah ini dikarenakan ketidaktahuan dari korban mengenai kepemilikan tanahnya telah dijual atau diberikan kepada orang lain oleh orang tua korban. Setelah korban menemukan bukti kepemilikan lama berupa *surat kebo'* dan *rinci* barulah mendatangi Kantor Kecamatan untuk mencari tahu tentang letak tanahnya. Padahal dalam *rinci* ataupun *surat kebo'* tersebut tidak dijelaskan mengenai peralihan hak tanah.

Faktor ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu korban bernama Arifuddin yang beralamat di Palleko yang

mengetahui tanah miliknya dikuasai oleh orang lain setelah diberitahu oleh keluarganya dan memperhatikan surat kepemilikan yang dimilikinya. Menurut keterangan ibunya tanah tersebut tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada orang lain. Berdasarkan hal tersebut dia menuntut pengembalian tanahnya kepada orang tersebut dan sekarang kasusnya masih dalam proses pengadilan.

Faktor kedua adalah karena tingginya harga tanah yang mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah mereka dan juga mengakibatkan susah untuk memperoleh lahan untuk digarap. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu korban H. Dolohan yang beralamat di Dusun Sarro yang mana kasusnya telah diadili di Pengadilan Negeri Takalar menjelaskan bahwa penyerobotan terhadap tanah miliknya dengan cara menanam padi tanahnya tanpa izin darinya. Pada saat itu dia dan saudaranya hendak menggarap tanah miliknya tiba-tiba saja Bakri dan Umar (para pelaku penyerobotan tanah) menahannya dan menghentikannya menggarap tanah tersebut. Kemudian sekitar bulan Januari tiba-tiba Bakri dan Umar tanpa seizin korban dan saudaranya menggarap tanah tersebut dengan cara menanam dengan tanaman padi.

Faktor ketiga adalah penjualan tanah orang tua dulu dengan menggunakan sistem kepercayaan sehingga tidak ada bukti terkait peralihan hak tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu korban yang bernama Bonang dg. Nai yang beralamat di Romangtangaya menjelaskan bahwa dg. Kulle (pelaku

penyerobotan tanah) telah melakukan penyerobotan tanah dengan cara masuk kedalam lokasi tanahnya kemudian membajak serta menanam tanaman padi. Pada awalnya tanah tersebut adalah milik Dg. Ngola ayah dari pelaku yang digadaikan kepada H. Bunga. Kemudian korban menebus tanah tersebut. Menurut korban, pelaku merasa tanah tersebut adalah miliknya padahal korban telah menebus tanah tersebut.

Selain dari beberapa faktor diatas, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa korban penyerobotan tanah penulis menyimpulkan salah satu faktor terjadinya penyerobotan tanah ini yakni kelalaian atau pembiaran yang dilakukan oleh pemilik tanah dalam hal ini korban. Korban melakukan pembiaran terhadap tanah miliknya saat diserobot atau digunakan oleh orang lain, setelah bertahun-tahun atau pada saat korban akan menggunakan tanahnya barulah korban melakukan pengaduan. Sebagai salah satu contoh adalah korban yang bernama Nurdin yang beralamat di Kecamatan Polombangkeng Utara. Tanah miliknya ditempati oleh orang lain tanpa izin darinya tapi dia mengetahuinya dan membiarkan begitu saja pada saat korban ingin menggunakan tanahnya barulah dia menuntut untuk dikembalikan tanahnya dan sekarang kasusnya dalam proses pengadilan karena orang yang menempati tanahnya menolak untuk mengembalikannya.

Berdasarkan beberapa faktor diatas kita dapat menyimpulkan bahwa korban seringkali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar,



secara langsung ataupun tidak langsung. Tanpa adanya korban tidak mungkin adanya kejahatan. Dalam hal ini peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak-pihak lain dan lingkungannya.

#### **B. Upaya yang Dilakukan Kepolisian dan Pemerintah Setempat dalam Menanggulangi Adanya Korban Penyerobotan Tanah.**

Penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib untuk melakukan sebuah tindakan agar kejahatan tidak terjadi lagi. Dan diharapkan masyarakat tetap merasa aman dan nyaman dalam menjalani kesehariannya tanpa ada sebuah ancaman kejahatan terhadapnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Rusdiono (13 Maret 2017) menjelaskan bahwa Polres Takalar telah melakukan upaya-upaya untuk menggulangi terjadinya penyerobotan tanah di Kabupaten Takalar dan memproses pengaduan dan laporan yang masuk. Sejalan dengan hal tersebut penulis juga telah melakukan wawancara dengan Heri, S.Sos.(7 Maret 2017) selaku Sekretaris Camat Galesong mengungkapkan pemerintah Kecamatan Galesong telah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan memproses aduan atau sengketa yang masuk dan mengupayakan mediasi untuk penyelesaian kasus penyerobotan tanah. Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh

pihak kepolisian maupun pemerintah setempat yakni melalui upaya preventif dan represif.

Bentuk penanggulangan kejahatan secara preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali karena mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik pelaku menjadi lebih baik kembali. Menurut Aipda Rusdiono Upaya yang dilakukan dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi dengan bantuan BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) di tiap kelurahan dilakukan penyuluhan hukum diberbagai tempat, hal ini diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyerobotan tanah. serta mengajak masyarakat untuk mengutamakan suatu mediasi untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Upaya Preventif yang dilakukan pihak Kecamatan Galesong menurut Heri, S.Sos. yakni dengan mengadakan sosialisasi secara rutin memeriksa kelengkapan surat tanah masyarakat dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar mengurus sertifikat tanah ataupun surat bukti penguasaan tanah agar dapat menghindari potensi kejahatan semacam ini, dengan demikian masyarakat disekitarnya merasa aman dan tentram dari gangguan yang meresahkan yang mungkin biasa terjadi dengan tiba-tiba serta menimbulkan suatu keributan ataupun perkelahian pada lokasi kejadian tersebut.

Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan sebuah tindakan setelah terjadinya tindak penyerobotan tanah. Aipda Rusdiono menyatakan bahwa upaya represif dilakukan dengan

menindaklanjuti setiap laporan ataupun pengaduan yang masuk terkait penyerobotan tanah. Kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana, guna memberikan efek jera, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengimplementasian aturan serta sanksi hukum oleh aparat hukum diharapkan selalu berdasarkan rasa keadilan dan tidak tebang pilih sehingga menciptakan kepercayaan dan citra yang baik kepada aparat hukum untuk bertugas secara optimal dan sebaik-baiknya. Penanggulangan kejahatan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulangnya.

Pada tingkat kecamatan dalam hal ini Kecamatan Galesong, menurut A. Nuraeni Nurdin upaya represif yang dilakukan adalah dengan memproses segala pengaduan masyarakat yang masuk kemudian melakukan mediasi antara korban dengan pelaku untuk mengupayakan adanya perdamaian antara kedua belah pihak. Terdapat beberapa kasus mediasi yang berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan cara pemberian ganti rugi oleh pelaku kepada korban. Salah satu contohnya yakni mediasi antara subaedah melawan salma yang berhasil didamaikan dengan pemberian ganti rugi kepada salma yang terbukti memiliki tanah tersebut oleh subaedah. Namun, dalam beberapa kasus mediasi yang

dilakukan oleh pihak kecamatan gagal untuk mendamaikan kedua pihak sehingga harus diteruskan ke kepolisian ataupun pengadilan.

Untuk mewujudkan segala jenis upaya pencegahan atau penanggulangan terhadap kejahatan penyerobotan tanah khususnya di Kabupaten Takalar, selain melibatkan instansi terkait seperti kepolisian dan pemerintah setempat perlu juga kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum serta ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku. Salah satu caranya adalah dengan cara melaporkan setiap kejahatan yang dialaminya ke pihak yang berwajib serta melindungi dan memperhatikan kepemilikan tanahnya sehingga tidak diserobot oleh orang lain. Dengan demikian pencegahan dan penanggulangan akan kejahatan tersebut dapat terselesaikan dengan baik sehingga dapat mengurangi terjadinya penyerobotan tanah agar terwujud ketentraman didalam masyarakat serta mencegah terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab hasil penelitian, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan, sebagai berikut:

1. Peranan korban dalam terlaksananya penyerobotan tanah adalah karena adanya faktor ketidaktahuan dari korban mengenai kepemilikan tanahnya, tingginya harga tanah serta penjualan tanah orang tua dulu dengan menggunakan sistem kepercayaan sehingga tidak ada bukti terkait peralihan hak tanah tersebut.
2. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian maupun pemerintah setempat dalam menanggulangi terjadinya penyerobotan tanah yaitu: upaya preventif dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi dengan bantuan BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) serta mengadakan sosialisasi secara rutin memeriksa kelengkapan surat tanah masyarakat dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar mengurus sertifikat tanah ataupun surat bukti penguasaan tanah. Upaya represif dengan menindaklanjuti setiap laporan dan pengaduan terkait penyerobotan tanah yang terjadi, mengupayakan mediasi untuk mendamaikan kedua pihak dan memberikan sanksi sesuai peraturan yang ada.

## **B. Saran**

1. Kepada semua pihak baik masyarakat, maupun aparat penegak hukum dan pemerintah setempat perlu mengefektifkan upaya preventif maupun represif. Namun hendaknya lebih baik jika kita semua mengutamakan upaya-upaya preventif jauh lebih baik untuk menghindari munculnya korban.
2. Korban selaku pihak yang dirugikan diharapkan untuk turut berpartisipasi di dalam upaya memberantas atau mengurangi terjadinya penyerobotan tanah dengan cara melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib serta melindungi dan memperhatikan kepemilikan tanahnya sehingga tidak diserobot oleh orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan : kumpulan Karangan*. Akademika Pressindo: Jakarta.
- A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books: Makassar.
- Bambang Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Sinar Grafika.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Hambali Thalib. 2005. *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*. PT Umitoha Ukhuwah Grafika: Makassar.
- I Wayan Suandra. 1994. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta.
- J.E. Sahetapy. 1995. *Bungai Rampai Viktimisas*. Eresco: Bandung.
- Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Delik- Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Denpasar: Djambatan.
- Muhadar. 2013. *Korban Pembebasan Tanah Prespektif Viktimologis*. Rangkang Education: Yogyakarta.
- Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- R. Susilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Poletia: Bogor.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahata*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

## **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

## **Situs web**

Ivor Ignasio Pasaribu, SH. 2013. "Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana" <http://www.hukumproperti.com/pertanahan/penyerobotan-tanah-secara-tidak-sah-dalamperspektif-pidana/>, diakses pada September 2016.